

BAB I: PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Krimea atau yang lebih dikenal dengan Semenanjung Krimea adalah sebuah wilayah yang terletak di selatan Ukraina, berbatasan langsung dengan Ukraina di bagian utara, Laut Azov di timur laut, dan Laut Hitam yang mengelilingi sisi Krimea lainnya. Apabila terus menyusuri ke arah barat, maka akan menjumpai daratan Eropa Barat. Krimea sendiri masih terhubung dengan daratan utama Ukraina melalui Isthmus of Perekop, yakni jalan seluas 5-7 kilometer yang menghubungkan Krimea dengan Provinsi Kherson, Ukraina. Di sisi timur Ukraina juga berdekatan dengan daratan Rusia yakni Kuban yang dipisahkan oleh Selat Kerch dan kini terhubung sejak didirikannya Jembatan Krimea yang menghubungkan Krimea dengan Rusia pada 2018. Luas wilayah Krimea sebesar 27.000 km² dengan jumlah populasi 2.033.736 per tahun 2001 (Britannica, t.t). Letak geografis Krimea yang strategis menjadikan wilayah tersebut memiliki nilai strategis tersendiri, utamanya dibidang militer. Sebelum bergabung dengan Ukraina, Krimea menjadi tempat persinggahan bagi banyak suku dan menjadi wilayah sengketa antara Rusia dan Ukraina (Dolya, 2016).

Krimea baru masuk menjadi wilayah administrasi Ukraina setelah penyerahan otoritas dan yurisdiksi dari Uni Soviet oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1954. Ketika Ukraina masih bergabung dengan Republik Sosialis Soviet, perpindahan orang atau penduduk tidak dapat terhindarkan sehingga tidak menutup kemungkinan banyak orang Rusia yang tinggal di Ukraina, terutama di Krimea. Banyak orang etnis Rusia yang tinggal di Krimea menjadikan wilayah tersebut didominasi oleh etnis Rusia dibandingkan dengan penduduk asli Ukraina. Ketika Ukraina mendeklarasikan diri menjadi negara independen pada tahun 1991, hasil referendum menunjukkan bahwa Krimea merupakan wilayah yang menunjukkan angka kesetujuan paling sedikit atas kemerdekaan Ukraina diantara wilayah lainnya. Maka ketika referendum pada Maret 2014

diselenggarakan di Krimea, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Krimea setuju untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia (Salushev, 2014). Hingga saat ini, status wilayah ini masih menjadi sengketa dimana Krimea diakui sebagai wilayah administrasi Ukraina oleh Ukraina dan banyak negara lainnya namun disisi lain Krimea juga masuk dalam wilayah administrasi Rusia sejak peristiwa Aneksasi Krimea tahun 2014.



Gambar 1.1: Peta Ukraina pasca Aneksasi Krimea 2017 (Al Jazeera, 2017)

Sebelum terjadi referendum di Krimea, Rusia terlebih dahulu melangkah dengan memberikan pengakuan kepemilikan wilayah atas Krimea dan Sevastopol serta mengambil alih kontrol dan kekuasaan di kedua wilayah tersebut. Rusia menyatakan aneksasi terhadap Krimea dan Sevastopol secara de facto, namun belum mendapatkan pengakuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Kartini, 2014). Selain itu, Ukraina juga telah melalui banyak dinamika sejak Revolution of Dignity tahun 2013-2014 atau yang dikenal sebagai Euromaidan, lalu menghadapi Aneksasi Krimea, konflik separatisme di perbatasan Ukraina Timur, hingga pengetatan kontrol Rusia di Laut Azov dan Laut Hitam. Hal ini menjadikan Ukraina bekerja keras dengan mengembangkan kemampuan militer guna mempertahankan

teritorial, meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, reformasi kebijakan, mempertahankan nilai-nilai demokratis, hingga memperoleh kemerdekaan formal Gereja Ortodoks Ukraina (Welt, 2020).

Hasil referendum atas bergabungnya Krimea dengan Rusia tersebut dianggap ilegal oleh United Nations General Assembly (UNGA) pada 27 Maret 2014 karena tidak merepresentasikan seluruh masyarakat yang tinggal di Krimea. Saat pertemuan ke-45 yang diselenggarakan oleh United Nations Human Rights Council (UNHRC), sebanyak 41 negara menyetujui Menteri Luar Negeri Ukraina atas pernyataannya yang menyampaikan situasi dan kondisi di Krimea. Resolusi UNGA 4/168 dibenarkan oleh Menteri Luar Ukraina bahwa situasi di Krimea semakin memprihatinkan, dimana terjadi penurunan perhatian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan melemahnya kedaulatan serta integritas teritorial akibat aneksasi secara ilegal oleh Rusia terhadap Republik Otonomi Krimea dan Sevastopol yang melanggar hukum internasional. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meng-highlight adanya pelanggaran hukum internasional yang tercakup dalam konflik Krimea, seperti penganiayaan; pemindahan orang secara paksa; pembatasan hak-hak sosial warga negara seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan berkumpul; serta kebebasan berekspresi (112 International, 2020). Lantas hal ini direspon oleh komunitas internasional seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) dengan memberikan sejumlah sanksi kepada Rusia, diantaranya adalah pembekuan aset; pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya seperti minyak bumi, gas alam, energi, dan industri pertahanan; pembatasan akses terhadap pasar; pengawasan terhadap barang dan pelayanan militer milik Rusia; dan kontrol atas item fungsi ganda (Hansson et al., 2014).

United Nations Security Council (UNSC) juga melakukan pemungutan suara draft resolusi sebagai bentuk pencegahan Referendum Krimea. Hasilnya, sejumlah 13 negara anggota tetap UNSC mendukung resolusi, satu negara absen yaitu Tiongkok, dan satu negara yang menolak yaitu Rusia. Lebih lanjut, UNGA mengeluarkan Resolusi 68/262 pada 27 Maret 2014 dengan hasil 100 negara mendukung resolusi, 11 negara lainnya tidak

setuju, dan sisanya memilih untuk abstain. Diantara negara-negara yang abstain atau tidak memberikan suara, salah satunya adalah Afghanistan (Bering, 2017).

Afghanistan justru melakukan hal sebaliknya. Dilansir dari laman New York Times (2014), Afghanistan adalah salah satu negara yang mendukung Rusia atas hasil Referendum Krimea, bersama dengan Syria dan Venezuela. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Hamid Karzai melalui juru bicara kepresidenan Afghanistan, Aimal Faizi, bahwa Afghanistan sepenuhnya mendukung keputusan rakyat Krimea untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak mereka melalui hasil referendum atas bergabungnya Krimea dan Sevastopol menjadi bagian dari wilayah administrasi Rusia. Afghanistan menganggap bahwa Aneksasi Krimea yang dilakukan oleh Rusia merupakan langkah yang legal serta menjadi bentuk dukungan dan pengakuan Afghanistan terhadap wilayah administratif baru Rusia tersebut. Banyak yang meyakini bahwa langkah Afghanistan merupakan cerminan diri mereka di masa lalu ketika terjadi penjajahan di daratan Asia Selatan oleh Inggris juga memisahkan banyak sanak saudara yang hidup di daerah perbatasan demi terbentuknya batas negara seperti yang saat ini dimiliki oleh Afghanistan (Rosenberg, 2014).

Amerika Serikat (AS) memiliki hubungan yang dekat dengan Afghanistan dan menjadi salah satu negara yang memberikan banyak bantuan kepada Afghanistan, baik bantuan dana, kemanusiaan, hingga militer, terutama pasca peristiwa 9/11 dalam propaganda “War on Terrorism” guna memperkuat kapabilitas Afghanistan dibidang keamanan, pemerintahan, institusi, hingga ekonomi (U.S. Department of State, t.t). Uni Eropa juga aktif sebagai pendonor bantuan kepada Afghanistan semenjak jatuhnya Taliban pada tahun 2001 dengan rutin memberikan sejumlah dana yang digunakan untuk membangun pemerintahan Afghanistan yang lebih baik dan demokratis (International Crisis Group, 2005). Dalam kasus Aneksasi Krimea pada tahun 2014, Hamid Karzai sebagai kepala pemerintahan Afghanistan menyatakan dukungannya terhadap hasil referendum Krimea oleh Rusia. Pernyataan banyak ditolak oleh banyak negara, utamanya

negara-negara Aliansi Barat dimana Hamid Karzai seharusnya merefleksikan pihak Barat yang tidak setuju atas aneksasi tersebut.

I.2 Rumusan Masalah

Faktor pendorong apakah yang mempengaruhi Hamid Karzai sebagai Presiden Afghanistan untuk mendukung hasil referendum bergabungnya Krimea menjadi wilayah administrasi Rusia?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui motif atau alasan Afghanistan mendukung hasil referendum Aneksasi Krimea 2014 melalui pernyataan presiden Afghanistan yang sedang menjabat yaitu Hamid Karzai. Motif atau alasan tersebut ditinjau melalui analisis latar belakang politik luar negeri Afghanistan, latar belakang Hamid Karzai dan politik luar negeri di era kepemimpinannya, serta relasi Afghanistan dengan AS dan Rusia sebagai dua negara yang berpengaruh besar di Afghanistan.

I.4 Tinjauan Pustaka (Literature Review)

Dalam salah satu artikel New York Times yang berjudul “Breaking with The West, Afghan Leader Supports Russia’s Annexation of Crimea”, Presiden Afghanistan Hamid Karzai memberikan dukungan bagi Rusia dimana ia menjunjung tinggi adanya kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat Krimea dengan memutuskan untuk bergabung dengan Rusia melalui referendum. Hal ini dilakukan atas dasar kesamaan kejadian yang juga menimpa salah satu kelompok etnis terbesar di Afghanistan yaitu Pashtun yang secara tidak adil dipisah paksa dengan keluarga dan kerabatnya ketika penetapan perbatasan Afghanistan dari kepemilikan kekaisaran Asia Selatan. Aneksasi Krimea juga dikatakan sebagai langkah legal atau sah dilakukan oleh Rusia yang kembali melakukan ekspansi dengan menetapkan batas wilayah baru di Krimea sebagai bagian wilayah

administrasinya. “Afghanistan akan selalu menghargai dan menghormati keinginan masyarakat Afghanistan untuk menentukan masa depannya secara mandiri,” tulis Aimal Faizi, juru bicara Presiden Karzai, dalam sebuah surel. Disamping itu, keberpihakan Afghanistan pada Rusia juga berkaitan dengan pendampingan yang semakin gencar dilakukan oleh Rusia kepada Afghanistan yaitu dana pembangunan. Hal ini lantas kemudian dipandang sebagai salah satu bentuk nyata dari implementasi kebijakan luar negeri Afghanistan dengan menjalin hubungan erat dengan Rusia dengan memberikan kesempatan bagi Rusia untuk menebarkan pengaruhnya di sepanjang perbatasan Afghanistan (Rosenberg, 2014).

Kehadiran Rusia di kawasan Asia Selatan sendiri sudah terjadi sejak abad ke-19 yaitu tepatnya ketika Great Game antara Rusia dengan Inggris pada tahun 1830. Tujuan Soviet memperluas pengaruhnya ke Afghanistan pada mulanya adalah adanya potensi ekonomi atau dorongan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Perselisihan antara keduanya terus berlanjut hingga terjadi Perang Anglo-Afghan I dan II pada tahun 1838 dan 1872. Hubungan Afghanistan dengan Uni Soviet semakin dekat ketika Mohammed Daoud Khan naik takhta menjadi pemimpin Afghanistan pada 1953. Pada saat terjadi Perang Dunia II dan Perang Dingin, Afghanistan memilih untuk netral sebab tidak terlibat langsung dalam kedua perang tersebut. Netralitas Afghanistan lantas dipandang sebagai keuntungan baik Soviet dan AS untuk masuk dan menanamkan pengaruhnya di Afghanistan dengan memberikan sejumlah bantuan berupa pembangunan jalan tol, bandar udara, dan infrastruktur vital lainnya. Daoud Khan menjadi orang Afghanistan pertama yang berbicara saat kongres dan bertemu dengan Presiden Amerika, Dwight Eisenhower, untuk menanda tangani perjanjian pertukaran budaya dan jadwal kunjungan ke Afghanistan (Lumen, t.t).

Sementara dengan AS, Afghanistan juga memiliki hubungan yang sudah dimulai sejak lama, yaitu 1935. Tujuan AS tidak lain adalah untuk membendung pengaruh yang dibawa oleh Uni Soviet. Insiden serangan gedung World Trade Center (WTC) pada 11 September sebagai peristiwa titik balik kebangkitan terorisme (U.S. Embassy in Afghanistan, t.t). AS

bersama dengan North Atlantic Treaty Organization (NATO) mengambil alih kepemimpinan International Security Assistance Force Mission (ISAF) milik PBB untuk bertugas di Afghanistan. Pasukan ISAF bersama Afghan National Defense and Security Forces (ANDSF) bekerjasama untuk meningkatkan kapabilitas ANDSF. Lebih dari 2.400 jiwa tentara AS tewas sejak 2001 dan lebih dari 20.000 personel bertempur di Afghanistan. Seiring dengan meningkatnya kemampuan tentara nasional Afghanistan, jumlah pasukan AS terus dikurangi hingga pada tahun 2014 pasukan ISAF resmi diberhentikan dan dikembalikan sepenuhnya pada ANDSF (U.S. Department of State, 2021).

Selama bertahun-tahun, Afghanistan mengalami dinamika perkembangan negara yang panjang dan kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Dari faktor internal, pergantian kepemimpinan Afghanistan secara tidak langsung menciptakan dinamika politik yang berbeda setiap masa. Sementara faktor eksternal yaitu banyaknya imigran asing masuk dan negara-negara yang berusaha memperpanjang tangan atau pengaruhnya di Afghanistan, termasuk Rusia dan AS. Pada tahun 2001 pasca diserangnya Gedung WTC dan Pentagon menjadi salah satu titik balik dalam perkembangan politik Afghanistan. AS dengan kampanyenya melawan terorisme, masuknya pasukan tentara milik barat, dan diratifikasinya Bonn Agreement atau Perjanjian Bonn (Yunespour, 2011). Secara garis besar, perjanjian tersebut berisi tentang pembentukan Afghan Interim Authority (AIA) yakni sebuah badan otoritas sementara oleh Loya Jirga darurat. Dalam perjanjian ini diatur sejumlah kerangka hukum, adopsi konstitusi baru, dan pengalihan integrasi seluruh kelompok bersenjata kedalam angkatan bersenjata Afghanistan yang dinaungi langsung oleh AIA. PBB sebagai badan intranasional diminta untuk berpartisipasi dalam pembentukan tentara nasional dan memfasilitasi implementasi pasca-perjanjian (United Nations Peacemaker, 2001). Perjanjian Bonn dibuat sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya pembentukan dan promosi perdamaian dengan menghentikan konflik, menghormati HAM, dan mempertahankan perdamaian dan stabilitas di

Afghanistan. Selain itu, perjanjian ini juga mengharapkan adanya partisipasi komunitas internasional yang memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat Afghanistan dalam membangun masa depan yang lebih baik, membuat komitmen dalam bantuan rehabilitasi, pemulihan, serta rekonstruksi di Afghanistan yang berkoordinasi dengan AIA (Mohammad, 2002).

Dalam proses pembangunan kembali negara pasca perang yang dialami, Afghanistan banyak menerima bantuan militer dari berbagai negara utamanya AS dan Rusia. AS bersama dengan NATO mengambil alih pasukan ISAF yang semula dipegang oleh PBB dengan mandat utama membantu pemerintah Afghanistan membentuk keamanan dalam negeri dengan mengembangkan pasukan keamanan Afghanistan. Terhitung sejak 2011, tanggungjawab keamanan negara dikembalikan kepada pasukan Afghanistan yaitu ANDSF secara bertahap dan resmi dipindah tangankan secara penuh pada 2014. Pasukan ISAF sendiri terdiri atas lebih dari 130.000 personel yang berasal dari seluruh negara anggota NATO dan negara afiliasi sehingga hal ini membantu menciptakan ruang bagi Afghanistan untuk perbaikan pemerintahan serta membangun relasi sosial-ekonomi untuk menciptakan stabilitas berkelanjutan (NATO, 2021). Hal yang sama dilakukan oleh Rusia, dimana penguasaan wilayah hingga invasi militer oleh Rusia terhadap Afghanistan di masa lalu membuat banyak peralatan perang bekas milik Uni Soviet masih digunakan oleh tentara dan pasukan keamanan Afghanistan. Hal ini membuat Rusia berasumsi bahwa mereka memiliki peran signifikan terhadap rekonstruksi di Afghanistan. Pada 22 September 2001, Presiden Vladimir Putin dan para kepala institusi melakukan pertemuan guna membahas langkah Rusia di Afghanistan dengan hasil memutuskan untuk memberikan akses udaranya untuk pengiriman bantuan keamanan ke Afghanistan, berbagai informasi intelijen mengenai perkembangan pergerakan teroris, memberikan bantuan pencari dan penyelamatan, meningkatkan bantuan militer kepada pasukan Aliansi Utara, serta menjadikan bandara Rusia bagi pasukan koalisi yang hendak masuk ke Afghanistan. Namun disisi lain, beberapa pejabat dan kepala

lembaga pertahanan dan penegakan hukum Rusia berkonsultasi dengan negara-negara Asia Selatan dengan maksud untuk membatasi militer Barat di kawasan tersebut melalui pembangunan kerjasama yang kuat antara negara-negara tersebut dengan Rusia. Pada tahun 2005, Rusia sempat menghentikan pengiriman peralatan perang gratis kepada insitusi pertahanan Afghanistan sebab hutang dan kemudian kembali mengirimkan suplai seperti semula pada 2010 setelah Afghanistan membayarkan hutangnya kepada Rusia, atas persetujuan AS sebagai bentuk investasi politik baik kepada Afghanistan maupun kepada AS (Menkiszak, 2011).

I.5 Kerangka Teoritik

I.5.1 Psikobiografi

Psikobiografi adalah sebuah pendekatan yang berasal dari teori atau konsep dalam ilmu psikologi dimana pada umumnya pendekatan ini diambil dari psikoanalisis atau jenis lain dalam teori kepribadian untuk mengetahui tentang fakta dari suatu biografis. Secara mudahnya, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui “seperti apakah orang tersebut”. Batas-batas penelitian dapat ditentukan sendiri oleh peneliti dimana mereka bisa menggambarkan keseluruhan aspek dari kepribadian subjek yang diteliti atau hanya beberapa aspek yang tidak mudah untuk dijelaskan dengan penjelasan biasa seperti kepentingan pribadi, logika, peran sosial, dan ekspektasi (Winter, 2006). Psikobiografi berfokus utama pada latar belakang psikologis dan perilaku seseorang yang kemudian nantinya akan menjadi prediksi tentang motivasi dari individu atau subjek tersebut. Subjeknya pun tidak hanya seseorang yang masih hidup namun juga mereka yang tak lagi hidup dengan mengintegrasikan dokumen-dokumen dari subjek tersebut, baik yang dipublikasikan maupun tidak, data tertulis lain, hingga wawancara dengan teman atau rekan yang memiliki keterikatan pekerjaan (Cara, 2007). Dalam hubungan internasional, psikobiografi berguna untuk menganalisa karakter pemimpin yang kemudian berpengaruh dalam proses pemutusan suatu kebijakan dengan melihat bagaimana

kehidupan pemimpin tersebut. Dengan ini maka dapat terlihat keterlibatan emosi yang berubah menjadi motivasi dan tujuan tertentu dalam proses pembuatan kebijakan. Faktor lainnya yang juga mempengaruhi adalah peristiwa yang terjadi pada saat ia memimpin, baik peristiwa dari dalam hingga luar negeri serta lingkungan pemerintahan juga akan menentukan hasil akhir dari sebuah kebijakan (Siswoyo, 2015). Adapun sejumlah orientasi kepribadian yang dikutip dari Hermann (1987b, dalam Post, 2006) yaitu ekspansionis, aktif atau independen, berpengaruh, mediator atau integrator, oportunis, dan pembangunan. Orientasi kepribadian ekspansionis adalah mereka yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kontrol atau kendali atas wilayah, sumber daya, dan manusia. Orientasi aktif atau independen adalah ketika seorang pemimpin berpartisipasi dalam komunitas internasional namun memiliki persyaratan tertentu sendiri agar tidak menimbulkan hubungan ketergantungan dengan negara lain. Sementara orientasi kepribadian berpengaruh adalah pemimpin yang ingin memiliki dampak terhadap kebijakan luar negeri negara lain dengan berperan dalam kepemimpinan sebuah kelompok berskala regional atau internasional. Orientasi mediator berfokus pada langkah rekonsiliasi antarnegara dengan menyelesaikan permasalahan di tingkat internasional. Orientasi oportunis memiliki kecenderungan untuk mengambil keuntungan dari peristiwa yang sedang terjadi dengan menangani permasalahan serta orientasi pembangunan yang berkomitmen untuk melakukan perbaikan negaranya sendiri melalui bantuan yang diberikan oleh negara lain dan organisasi internasional (Post, 2006).

I.5.2 Neorealisme

Neorealisme merupakan salah satu dari sekian banyak perspektif dalam teori-teori hubungan internasional kontemporer. Neorealisme mengkritik perspektif induknya, yaitu realisme bahwa terjadinya perebutan kekuasaan dalam hubungan internasional adalah hal yang lumrah dan sesuai dengan sifat dasar manusia yang konfliktual. Bagi neorealisme, sifat dasar manusia bukan menjadi faktor utama terjadinya konflik namun karena struktur internasional yang anarki sehingga memaksa negara untuk berlaku agresif.

Hal ini memberikan peluang bagi suatu negara untuk menyerang dan diserang tanpa dapat diprediksi sehingga setiap negara berusaha untuk mencapai *security* atau kapabilitas keamanan dan *power* atau kekuatan. Disamping itu, neorealisme menilai bahwa politik internasional memberikan panggung bagi negara untuk mencari dan berlomba untuk memperoleh kekuasaan (Dharmaputra, 2016).

Selain itu, neorealisme pun mengabaikan adanya perbedaan budaya dan rezim yang dimiliki masing-masing negara sebab sistem internasional menciptakan insentif dasar yang sama dalam memahami tentang kekuatan. Neorealisme memandang seluruh negara seperti kotak hitam yakni semua negara terlihat sama, hanya saja ada negara yang lebih dan kurang kuat dibandingkan dengan yang lain. Adapun lima asumsi dasar sebagai pedoman bagi neorealisme dalam menginterpretasikan sistem internasional. Pertama, aktor utama dalam politik internasional adalah negara dengan kapabilitas kekuatan yang besar, dimana fakta ini kemudian dimanfaatkan oleh mereka untuk mengendalikan sistem internasional yang anarki. Kedua, semua negara memiliki kemampuan militer yang ofensif, artinya negara berpotensi untuk mengancam negara lainnya dengan tingkat dan variasi yang berbeda dan dapat berubah-ubah setiap waktu. Ketiga, negara tidak dapat memprediksi secara pasti intensi setiap negara. Maka dari itu, tujuan utama setiap negara adalah untuk bertahan diri dalam sistem yang anarki ini, yang menjadi asumsi keempat dari neorealisme. Asumsi terakhir ialah negara merupakan aktor yang rasional dimana mereka mampu meningkatkan kapabilitasnya dan memaksimalkan kekuatannya untuk bertahan diri. Berangkat dari kelima asumsi diatas, maka politik internasional berpotensi berubah menjadi medan perang yang tidak hanya melibatkan banyak manusia didalamnya namun juga memungkinkan kehancuran negara. Disamping itu, neorealisme tidak menampik adanya kemungkinan negara untuk membentuk berbagai aliansi dalam menghadapi berbagai ancaman (Mearsheimer, dalam Dunne et al., 2013).

I.6 Hipotesis

Penulis memiliki tiga hipotesis. Pertama, Hamid Karzai mendukung hasil referendum Aneksasi Krimea sebab secara historis Krimea dahulunya adalah bagian dari Rusia yang kemudian diserahkan pada Ukraina pada saat Uni Soviet berada dibawah kekuasaan Nikita Khrushchev, sehingga ada anggapan bahwa bergabungnya Krimea sebagai wilayah administrasi Rusia adalah mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik Rusia, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Hal ini meresonansi dari peristiwa yang sama di masa lalu ketika Kelompok Pashtun terpisahkan menjadi Afghanistan-Pashtun dengan Pakistan-Pashtun setelah terbentuk Garis Durand. Langkah untuk menyatukan kedua jenis Pashtun tersebut juga sempat dilakukan oleh Hamid Karzai ketika ia masih menjabat sebagai Presiden Afghanistan. Kedua, ia tidak menyukai bagaimana AS “menyetir” pemerintahan negaranya sehingga ia cenderung untuk memimpin Afghanistan dan menjalankan pemerintahannya dengan caranya sendiri, termasuk memilih untuk lebih mendekatkan diri dengan Rusia yang didasarkan oleh idiosinkratik kepribadian pemimpin aktif-independen. Ketiga, Rusia juga memberikan asistensi kepada Afghanistan sebagai bentuk balancing kekuatan AS karena adanya security dilemma dan melihat situasi melemahnya hubungan AS-Afghanistan dan persetujuannya untuk mendukung langkah rekonsiliasi Hamid Karzai terhadap Taliban. Hal ini mendorong Hamid Karzai untuk lebih mendekatkan diri dengan Rusia dibandingkan dengan AS.

I.7 Metodologi Penelitian

I.7.1 Definisi dan Operasionalisasi Konsep

I.7.1.1 Idiosinkratik

Dalam memahami keterlibatan seseorang atau individu dalam proses pemutusan kebijakan luar negeri dapat menggunakan konsep idiosinkratik yang mampu menjelaskan bagaimana seseorang mampu menciptakan sebuah kebijakan dengan meninjau faktor personal yang mempengaruhi

individu tersebut. Faktor tersebut diantaranya adalah latar belakang, perjalanan karir, tujuan keinginan, serta informasi (Rosenau, 1980). Secara tidak langsung, pendekatan ini meninjau berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana mental seseorang terbentuk dan berkembang dari waktu ke waktu, seperti pembentukan karakteristik, moral, emosi, hingga sikap yang dibangun sepanjang individu tersebut hidup (Warren, dalam Kartini dan Kartono, 1974). Seluruh kejadian yang ada dalam hidup individu tersebut dianggap sebagai input, kemudian direspon melalui proses konversi yang berbentuk sebuah tindakan, hingga menjadi sebuah kebijakan sebagai output. Hal ini menjadikan individu tersebut memiliki pengaruh yang kuat dalam proses keputusan sebuah kebijakan, tidak hanya berpengaruh bagi wilayah dan kelompok yang diwakilkan namun juga secara global sebab di tangan individu tersebutlah kemana arah kebijakan tersebut; dapat mengarah pada agresif atau damai (Hermann, 1980). Preston (2006) menambahkan bahwa selain faktor internal atau kemunculan motivasi dari dalam diri sendiri, kebijakan politik lingkungan sekitar juga banyak mempengaruhi sebab individu tersebut tentunya memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi sehingga membutuhkan informasi. Gaya kepemimpinan, adanya pihak penasihat, dan pola pembentukan kebijakan dalam kelompok kepentingan ikut serta dalam faktor-faktor tersebut.

Margaret G. Hermann, terdapat tujuh karakter kepribadian pemimpin negara: (1) Terlatih dalam urusan luar negeri, dimana sebelumnya sudah berkecimpung dibidang politik luar negeri dan pernah memiliki posisi tertentu sehingga mampu membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam proses pembuatan kebijakan; (2) Nasionalisme, mendahulukan kepentingan negara atas rasa cintanya terhadap negara; (3) Percaya dengan kemampuan sendiri dalam menghadapi suatu situasi dengan mengenali masalah-masalah yang ada dan mengendalikannya; (4) Kebutuhan akan kekuatan dengan maksud mengembalikan kekuatan negara yang dipimpin; (5) Kebutuhan akan perdamaian dan persatuan dengan mengutamakan kekerabatan; (6) *Conceptual complexity* yaitu pengamatan terhadap masing-masing aktor

ketika dihadapkan dengan sebuah masalah; dan (7) Tidak percaya terhadap orang lain, sering diikuti perasaan takut dan cemas karena ancaman. Karakteristik ini memiliki kecenderungan sering berprasangka buruk terhadap aktor lain. Sementara Hermann dalam Falkowski (1979) menguraikan kepribadian individu yang merefleksikan kepribadian politik menjadi enam karakter, yaitu ekspansionis yang agresif dan ingin mempertahankan kekuasaan, aktif-independen yakni berpartisipasi dalam interaksi politik tanpa melepaskan atau merugikan hubungannya dengan pihak lain, influensial dengan keinginan untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri negara lain, mediator atau penghubung, oportunis atau pintar memanfaatkan kesempatan, dan partisipatif dengan aktif dalam politik internasional.

	Ekspansionis	Aktif-Independen	Influensial	Mediator	Oportunis	Partisipatif
Nasionalisme	✓	✓				
<i>Believe in their own ability to control</i>	✓	✓	✓	✓		
Kebutuhan Kekuatan	✓		✓	✓		
Kebutuhan Persatuan		✓	✓	✓		✓
<i>Conceptual Complexity</i>		✓		✓	✓	✓
Rasa tidak percaya	✓					

Tabel 1.1: Penggambaran ciri karakter kepribadian pemimpin negara dengan kepribadian politik (Hermann dalam Falkowski, 1979)

I.7.1.2 *Security Dilemma dan Balancing*

Sifat dasar manusia yang cenderung untuk selalu berkonflik kemudian menimbulkan perasaan waspada dan saling curiga, dimana para aktor tidak mampu mengidentifikasi tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh suatu aktor. Terlebih, tujuan atau motif dari suatu tindakan tidak mampu dianalisis secara mendalam dan dibuktikan validitasnya sebab hal tersebut adalah rahasia sehingga tidak selalu ditunjukkan secara gamblang. Hal ini membuat aktor lainnya dirundung kecurigaan, ketidak pastian, dan perasaan ketakutan akan serangan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Inilah yang dimaksud dengan *security dilemma* atau insekuritas keamanan. Kecurigaan ini akan terus timbul ketika suatu aktor terus meningkatkan kekuatannya dengan harapan memiliki kapabilitas yang maksimal akan memberikan keamanan bagi mereka dalam menghadapi sistem internasional yang anarki. Langkah yang diambil oleh aktor lainnya yang merasa terancam adalah meningkatkan kapabilitas militernya, disebut dengan *balancing* atau penyeimbangan. Dalam Dharmaputra (2016), disebutkan beberapa faktor yang harus dipenuhi apabila ingin menciptakan perdamaian dengan melakukan penyeimbangan. Pertama, aktor yang terlibat harus memiliki kedaulatan, tidak peduli apakah aktor yang kuat, menengah, atau lemah. Kedua, ada perbedaan kekuatan dari para aktor yang terlibat. Apabila hanya ada aktor yang kuat, maka tidak akan terjadi penyeimbangan dan malah menjadi ajang bagi aktor tersebut untuk menunjukkan sejauh mana mereka kuat. Maka dari itu, harus ada aktor dengan kekuatan dibawah mereka—para aktor yang kuat—dengan tujuan akan ada aktor menengah dan lemah yang mendapatkan bantuan dengan mendekatkan diri dengan mereka yang kuat untuk mempertahankan eksistensi mereka dalam sistem internasional.

I.7.2 **Tipe Penelitian**

Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, peneliti berusaha untuk membangun gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata dan laporan resmi secara rinci sehingga jenis penelitian ini adalah eksplanatif. Peneliti akan

mengkaji dan menjelaskan fenomena secara rinci dengan mendeskripsikan kata-kata dalam ucapan dan tulisan dari individu, kelompok, organisasi, maupun negara dari berbagai secara objektif. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti mencoba untuk meneliti dan menjelaskan alasan Afghanistan mendukung hasil referendum Krimea oleh Rusia berdasarkan pernyataan Hamid Karzai yang saat itu tengah menjabat sebagai Presiden Afghanistan.

I.7.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terletak pada rentang waktu pemerintahan Hamid Karzai yakni tahun 2001-2014, termasuk ketika Aneksasi Krimea terjadi yaitu saat Hamid Karzai memberikan dukungannya terhadap hasil referendum tepat sebelum ia turun jabatan. Namun, penulis tidak menutup kemungkinan akan menggunakan data sebelum tahun 2001 maupun setelah 2014 apabila dibutuhkan dan menunjang penelitian.

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang akan digunakan meliputi dokumen pemerintahan, pernyataan resmi dalam pidato pemerintahan, dan transkrip wawancara baik milik Afghanistan, AS, dan Rusia. Sedangkan data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel-artikel dalam buku, surat kabar, *working paper*, tesis, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

I.7.5 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data *qualitative content analysis* yang berfokus pada interpretasi dan pemaknaan terhadap data dan teori yang dipilih. Teknik ini membutuhkan reduksi data guna mencari data-data yang relevan dan kredibel yang kemudian disajikan bersama dengan data dan dikaitkan dengan teori hingga mencapai sebuah kesimpulan. Kesimpulan

tersebut yang berfungsi sebagai pembukti dari hipotesis penelitian yang dibuat oleh penulis.

I.7.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi ke dalam lima bab. Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, hipotesis, dan metodologi penelitian. Bab kedua akan membahas mengenai politik luar negeri Afghanistan, biografi, dan politik luar negeri pada masa kepemimpinan Hamid Karzai. Bab ketiga meliputi informasi dan *statement* mengenai adanya resonansi konflik Garis Durand di Afghanistan pada Aneksasi Krimea dan ketidak sukaan Hamid Karzai terhadap AS. Bab keempat membahas analisis apakah kehadiran Rusia di Afghanistan adalah bentuk mengimbangi kekuatan atau menggantikan posisi AS sebagai negara yang mendominasi Afghanistan. Bab kelima atau bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan hasil analisis dari penelitian.